

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;
- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Brebes Tahun Anggaran 2022;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 133 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	3.1	LRA
		3.1.1 Pendapatan_LRA
		3.1.2 Belanja
	3.2	LO
		3.2.1 Pendapatan –LO
		3.2.2 Beban
		3.2.3 Kegiatan Non Operasional
		3.2.4 Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		3.3.1 Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca
		3.4.1 Aset
		3.4.2 Kewajiban
		3.4.3 Ekuitas
	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
	3.6	Laporan Arus Kas BLUD
	3.7	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BLUD
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	

Bab I	Pendahuluan
Bab V	Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	2.652.000.000	2.299.536.000	(352.464.000)	86,71%
2	Pendapatan Transfer			-	
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.652.000.000	2.299.536.000	(352.464.000)	86,71%

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah			-	
2	Retribusi Daerah	2.652.000.000	2.299.536.000	(352.464.000)	86,71%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah			-	
	Jumlah PAD	2.652.000.000	2.299.536.000	(352.464.000)	86,71%

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. 2.299.536.000 dari target yang ditetapkan Rp.2.652.000.000 atau 86,71%.

2) Realisasi pendapatan Rp.352.464.000 lebih kurang dari anggaran.

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	5.966.346.000	5.692.296.127	(274.049.873)	95,41%
2	Belanja Barang dan Jasa	10.194.233.624	9.562.874.022	(631.359.602)	93,81%
3	Belanja Modal	6.089.486.800	5.916.741.575	(172.745.225)	97,16%
	Jumlah	22.250.066.424	21.171.911.724	(1.078.154.700)	95,15%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp 5.692.296.127 dari anggaran yang ditetapkan Rp 5.966.346.000 atau 95,41%.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp 9.562.874.022 dari anggaran yang ditetapkan Rp 10.194.233.624 atau 93,81%.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp 5.916.741.575 dari anggaran yang ditetapkan Rp 6.089.486.800 atau 97,16 %.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 95,15 % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

2.2.1 Pendapatan

- Kurangnya sarana dan prasarana parkir kelengkapan petugas parkir menyebabkan tidak terjaringnya retribusi parkir secara optimal.
- Kurangnya penegakan hukum terhadap kendaraan umum penumpang dan barang, menyebabkan kurangnya kesadaran wajib uji untuk mengujikan kendaraannya.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.652.000.000	2.299.536.000	86,71%	2.274.225.500
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan				
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah				
Jumlah	2.652.000.000	2.299.536.000	86,71%	2.274.225.500

ngkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2022, maka realisasi pendapatan yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 25.310.500 atau 1,11%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp 2.652.000.000 Realisasi sebesar Rp 2.299.536.000 atau 86,71 %. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Pajak Daerah				
b. Retribusi daerah	2,652,000,000	2,299,536,000	86,71%	2,274,225,500
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah				
d. Lain-Lain PAD yang sah				
Jumlah	2,652,000,000	2,299,536,000	86,71%	2,274,225,500

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp2.299.536.000 atau 86,71 % dari target sebesar Rp 2.652.000.000 sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum	2.500.000.000	2.190.094.000	87,60%	2.159.258.500
Retribusi Jasa Usaha	152.000.000	109.442.000	72,00%	114.967.000
Retribusi Perizinan Tertentu				
Jumlah	2.652.000.000	2.299.536.000	86,71%	2.274.225.500

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000	1.352.295.000	90,15%	1.241.532.000
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.000.000.000	837.799.000	83,78%	917.726.500
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Retribusi Pelayanan Kependudukan				
Jumlah	2.500.000.000	2.190.094.000	87,60%	2.159.258.500

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal	150.000.000	107.424.000	71,62%	112.945.000
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	2.000.000	2.018.000	100,90%	2.022.000
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
Retribusi Penyeberangan di Air				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah	152.000.000	109.442.000	72,00%	114.967.000

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2023 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp 21.171.911.724 dari anggaran Rp 22.250.066.424 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Operasi	16.160.579.624	15.255.170.149	94,40%	13.629.071.193
b. Belanja Modal	6.089.486.800	5.916.741.575	97,16%	3.157.099.559
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer				
Jumlah	22.250.066.424	21.171.911.724	95,15%	16.786.170.752

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp 15.255.170.149 dari anggaran sebesar Rp 16.160.579.624 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
--------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------------------

Belanja Operasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	5.966.346.000	5.692.296.127	95,41%	4.964.182.075
Belanja Barang dan Jasa	10.194.233.624	9.562.874.022	93,81%	8.220.389.118
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				260.000.000
Belanja Bantuan Sosial				184.500.000
Jumlah	16.160.579.624	15.255.170.149	94,40%	13.629.071.193

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Gaji dan Tunjangan	3.485.977.000	3.343.198.856	95,90%	3.011.671.629
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	2.367.239.000	2.293.639.271	96,89%	1.952.510.446
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	71.130.000	43.758.000	61,52%	
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	42.000.000	11.700.000	27,86%	
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
g. Belanja Pegawai BOS				
h. Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah	5.966.346.000	5.692.296.127	95,41%	4.964.182.075

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Barang	1.344.204.777	1.232.093.072	91,66%	955.271.948
b. Belanja Jasa	7.223.408.268	6.829.004.688	94,54%	4.607.164.592
c. Belanja Pemeliharaan	818.377.748	788.135.557	96,30%	1.890.767.363
d. Belanja Perjalanan Dinas	808.242.831	713.640.705	88,30%	767.185.215
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-		-
f. Belanja Barang dan Jasa BOS		-		
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD		-		
J u m l a h	10.194.233.624	9.562.874.022	93,81%	8.220.389.118

- 1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

	Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a.	Belanja Barang Pakai Habis	1.344.204.777	1.232.093.072	91,66%	955.271.948
b.	Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c.	Belanja Barang Bekas Dipakai				
	J u m l a h	1.344.204.777	1.232.093.072	91,66%	955.271.948

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp 6.829.004.688 dengan rincian sebagai berikut :

	Belanja Jasa :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a.	Belanja Jasa Kantor	6.955.615.308	6.621.552.127	95,20%	4.276.229.596
b.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.152.960	29.133.198	47,64%	24.213.396
c.	Belanja Sewa Tanah				
d.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	19.980.000	19.980.000	100%	19.800.000
e.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.660.000	6.660.000	100%	96.840.000
f.	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g.	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				
h.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	180.000.000	151.679.363	84,27%	90.337.000
i.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				99.744.600
j.	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k.	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
l.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
	J u m l a h	7.223.408.268	6.829.004.688	94,54%	4.607.164.592

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp 788.135.557 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	587.002.748	557.407.513	94,96%	1.405.199.363
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	198.075.000	197.761.044	99,84%	485.568.000
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	33.300.000	32.967.000	99,00%	
J u m l a h	818.377.748	788.135.557	96,30%	1.890.767.363

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp 713.640.705 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	808.242.831	713.640.705	88,30%	767.185.215
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				
J u m l a h	808.242.831	713.640.705	88,30%	767.185.215

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp5.916.741.575 dari anggaran sebesar Rp6.089.486.800 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Tanah	-	-		-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.910.654.800	2.818.948.500	96,85%	731.144.559
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.178.832.000	3.097.793.075	97,45%	348.693.000
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-		2.016.989.000
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-		60.273.000
g. Belanja Modal Aset Lainnya	-	-		
Jumlah	6.089.486.800	5.916.741.575	97,16%	3.157.099.559

- a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah sebesar nihil

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp 2.818.948.500 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Alat Besar	1.400.000	1.280.000	91,43%	
b. Belanja Modal Alat Angkutan	444.496.000	421.000.000	94,71%	
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	18.904.000	15.460.000	81,78%	459.883.559
d. Belanja Modal Alat Pertanian				
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	19.920.000	19.470.000	97,74%	19.000.000
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	16.165.000	15.750.000	97,43%	14.518.000
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
h. Belanja Modal Alat Laboratorium				
i. Belanja Modal Komputer	142.169.800	137.360.000	96,62%	38.150.000
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi				
k. Belanja Modal Alat Pengeboran				
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	2.000.000	1.900.000	95,00%	
o. Belanja Modal Alat Peraga				
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
q. Belanja Modal Rambu-Rambu	2.265.600.000	2.206.728.500	97,40%	199.593.000
r. Belanja Modal Peralatan Olahraga				
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
Jumlah	2.910.654.800	2.818.948.500	96,85%	731.144.559

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 3.097.793.075 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Bangunan Gedung	3.178.832.000	3.097.793.075	97,45%	348.693.000
b. Belanja Modal Monumen				
c. Belanja Modal Bangunan Menara				
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
Jumlah	3.178.832.000	3.097.793.075	97,45%	348.693.000

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi nihil dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
b. Belanja Modal Bangunan Air				
c. Belanja Modal Instalasi				
d. Belanja Modal Jaringan				2.016.989.000
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD				
Jumlah				2.016.989.000

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar nihil dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
c. Belanja Modal Hewan				
d. Belanja Modal Biota Perairan				
e. Belanja Modal Tanaman				
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
g. Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi				
h. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud				60.273.000

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Rasio %	Realisasi 2022
i. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
j. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
Jumlah				60.273.000

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2023 dan 2022.

Pendapatan-LO tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.637.036.000 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan-LO	-	-	-	
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	2.299.536.000	2.274.225.500	25.310.500	1.11%
2. Pendapatan Transfer – LO			-	
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO	337.500.000	13.122.372.984	(12.784.872.984)	-97.43%
Jumlah	2.637.036.000	15.396.598.484	(12.759.562.484)	-82.87%

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp 2.299.536.000 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO				
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2.299.536.000	2.274.225.500	25.310.500	1,11%
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO				
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Jumlah	2.299.536.000	2.274.225.500	25.310.500	1,11%

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah – Lo adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Pajak Daerah – LO				
a. Pajak Hotel-LO				
b. Pajak Restoran-LO				
c. Pajak Hiburan-LO				
d. Pajak Reklame-LO				
e. Pajak Penerangan Jalan-LO				
f. Pajak Parkir-LO				
g. Pajak Air Tanah-LO				
h. Pajak Sarang Burung Walet-LO				
i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO				
j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO				
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO				
l. Pajak Lingkungan - LO				
Jumlah	-	-	-	

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Pendapatan Pajak Retribusi Daerah - LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO				
a. Retribusi Jasa Umum-LO	2.190.094.000	2.159.258.500	30.835.500	1,43%
b. Retribusi Jasa Usaha-LO	109.442.000	114.967.000	(5.525.000)	-4,81%
c. Retribusi Perizinan Tertentu-LO			-	
Jumlah	2.299.536.000	2.274.225.500	25.310.500	1,11%

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO				
a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN-LO				
b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD-LO				
c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta-LO				
Jumlah				

d. Lain-lain PAD yang Sah - LO

Lain-lain PAD yang Sah – LO adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain PAD yang Sah-LO				
a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO				
b. Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
c. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
d. Hasil Kerja Sama Daerah-LO				
e. Jasa Giro-LO				
f. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO				
g. Pendapatan Bunga-LO				
h. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO				
i. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO				
j. Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing-LO				
k. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO				
l. Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO				
m. Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO				
n. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO				
o. Pendapatan dari Pengembalian-LO				
p. Pendapatan dari BLUD-LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
q. Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO				
r. Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO				
s. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO				
t. Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)-LO				
u. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah-LO				
v. Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO				
w. Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO				
x. Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO				
Y Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO				
Jumlah				

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2023 adalah sebesar nihil dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO				
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO				
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO				
d. Bantuan Keuangan - LO				
Jumlah				

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2023 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO	337.500.000	13.122.372.984	(12.784.872.984)	-97%
b. Dana Darurat – LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
c. Pendapatan Lainnya – LO			-	
Jumlah	337.500.000	13.122.372.984	(12.784.872.984)	-97.43%

- a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :
Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang	337.500.000	13.122.372.984	(12.784.872.984)	-97%
d.				
Jumlah	337.500.000	13.122.372.984	(12.784.872.984)	-97.43%

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
Beban				
a. Beban Operasi	19.674.104.391	17.017.897.102,50	2.656,207,288.5	15,6%
b. Beban Transfer				
Jumlah	19.674.104.391	17.017.897.102,50	2.656,207,288.5	15,6%

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	5.779887.465	4.982.713.945	797.173.520	16,00%
b. Beban Persediaan	2.031.678.876	1.795.506.269	236.172.607	13,15%
c. Beban Jasa	6.710.466.387	4.602.772.817,5	2.107.693.569,5	45,79%
d. Beban Pemeliharaan	788.135.557	772.161.595	15.973.962	2,07%
e. Beban Perjalanan Dinas	713.640.705	768.745.215	(55.104.510)	-7,17%
f. Beban Bunga			-	
g. Beban Subsidi			-	
h. Beban Hibah		260.000.000	(260.000.000)	-100%
i. Beban Bantuan Sosial		184.500.000	(184.500.000)	-100%
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.650.295.401	3.622.776.219	27.519.182	0,76%
k. Beban Penyisihan Piutang			-	

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
1. Beban Lain-lain			-	
Jumlah	19.674.104.391	16.989.176.060,5	2.684.928.330,5	15,80%

a. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2023 adalah sebesar Rp 3.640.637.401 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|---|------------------|
| a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | Rp 1.223.643.029 |
| b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan | Rp 2.309.727.032 |
| c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | Rp 107.267.340 |

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2023 berupa amortisasi software sebesar Rp9.658.000 Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2023 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2023	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2022 (Rp)	Beban Amortisasi 2023 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2023 (Rp)
Software aplikasi SIM PKB dan jaringan UPUBKB Kluwut	6	43.684.105	8.736.821	43.684.105		43.684.105
Software aplikasi SIM PKB dan jaringan UPUBKB Pagojengan	6	43.684.105	8.736.821	43.684.105		43.684.105
Software aplikasi SIM PKB dan jaringan UPUBKB Kluwut	3	24.145.000	4.829.000	9.658.000	4.829.000	14.487.000
Software aplikasi SIM PKB dan jaringan UPUBKB Pagojengan	3	24.145.000	4.829.000	9.658.000	4.829.000	14.487.000
Jumlah	18	135.658.210	27.131.642	106.684.210	9.658.000	116.342.210

1.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO	nihil	nihil		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2023	Tahun 2022		
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	311.391.909	921.000.000	(609.608.091)	-66.19%
JUMLAH	311.391.909	921.000.000	(609.608.091)	-66.19%
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO	(311.391.909)	(921.000.000)	609.608.091	-66.19%

1. Surplus Non Operasional nihil
2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Non Operasional Lainnya– LO	
1	Aset Tetap yang dikeluarkan dari daftar (extracomptabel)	1.742.000
2	Penghapusan Aset Tetap dikurangi akumulasi penyusutannya	309.649.909
3		
		-
1		
2		
3		
4		
5		
6		
	Jumlah	-
	Total	311.391.909 -

Penjelasan :

- a. Aset Tetap dikeluarkan dari daftar karena tidak memenuhi kapitalisasi sebesar Rp 1.742.000
- b. Penghapusan Aset tetap Bangunan Terminal Banjarharjo sebesar Rp 435.870.000 dikurangi akumulasi penyusutannya sebesar Rp126.220.091 dengan nilai bersih Rp 309.649.909

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL dan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022.

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar **Rp 117.466.220.976** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp **115.913.549.205**, ditambah Surplus-LO TA 2023 sebesar minus **Rp 17.348.460.300** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp 28.756.347** , dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 18.872.375.724** .

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		
Koreksi Ekuitas Lainnya	28.756.347	
Jumlah	28.756.347	

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp 28.756.347 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp 312.233.186 - Rp 283.476.754) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Koreksi Akumulasi Penyusutan)	101
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	312.233.000
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	
Koreksi saldo persediaan awal	
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
Koreksi saldo awal kas	
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	
koreksi saldo awal salah pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan	
Koreksi saldo awal TGR yang tercatat di aset lainnya	
Jumlah	312.233.101

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2023 (Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD – MUT	
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) – HPS	
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	125
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	283.476.629
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian/koreksi saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Koreksi Saldo Awal Piutang DBH Pajak Pusat karena salah catat	
Penghapusan piutang	
Jumlah	283.476.754

3.4 PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
ASET		
1. Aset Lancar	153.027.688	275.271.692
2. Aset Tetap	117.549.750.781	115.776.838.969
3. Aset Lainnya	19.316.000	28.974.000
Jumlah Aset	117.722.094.469	116.081.084.661
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban	255.873.493	167.535.456
2. Ekuitas	117.466.220.976	115.913.549.205
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	117.722.094.469	116.081.084.661

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	153.027.688	275.271.692
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	153.027.688	275.271.692

A. KAS

nihil

B. PIUTANG

nihil

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

nihil

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar nihil :

Uraian	Th. 2023	Th. 2022
	Nihil	Nihil
Jumlah		

E. PERSEDIAAN

Rekening ini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2023	Th. 2022
Bahan		
Suku Cadang		
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	153.027.688	275.271.692
Obat-obatan	-	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
Natura dan Pakan	-	-
Persediaan Penelitian	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	153.027.688	275.271.692

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023
Bahan				-
Suku Cadang				-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	275.271.692	1.909.434.872	2.031.678.876	153.027.688
Obat-obatan				-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan				-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	275.271.692	1.909.434.872	2.031.678.876	153.027.688

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2023 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	275.271.692
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	1.232.093.072
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	677.341.800
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	
Jumlah Penambahan	1.909.434.872
Koreksi (-) Saldo Awal	

Uraian	Nilai (Rp)
Pemakaian	2.031.678.876
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	
Jumlah Pengurangan	2.031.678.876
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	153.027.688

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

nihil

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 117.549.750.781 dan Rp 115.776.838.969 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2023	Th. 2022
a. Tanah	4.036.186.719	4.036.186.719
b. Peralatan dan Mesin	25.734.271.660	25.130.543.260
c. Gedung dan Bangunan	120.172.602.581	115.616.937.206
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.218.020.107	3.218.020.107
e. Aset Tetap Lainnya	875.000	875.000
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	109.257.000	109.257.000
g. Akumulasi Penyusutan	(35.721.462.286)	(32.334.980.323)
Jumlah Aset Tetap	117.549.750.781	115.776.838.969

Mutasi aset tetap tahun 2023 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2023
a. Tanah	4.036.186.719	-	-	4.036.186.719
b. Peralatan dan Mesin	25.130.543.260	1.016.882.400	413.154.000	25.734.271.660
c. Gedung dan Bangunan	115.616.937.206	5.671.725.175	1.116.059.800	120.172.602.581
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.218.020.107	-	-	3.218.020.107
e. Aset Tetap Lainnya	875.000	-	-	875.000
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	109.257.000	-	-	109.257.000
JUMLAH	148.111.819.292	6.688.607.575	1.529.213.800	153.271.213.067

1) Rincian **mutasi penambahan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	5.919.589.575
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	119.285.000
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	337.500.000
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	312.233.000
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	6.688.607.575

Penjelasan :

- a) Belanja Modal senilai Rp 5.919.589.575 .
- b) Reklasifikasi dari Belanja Jasa senilai Rp 119.285.000 dari Detail engineering dan Jasa Pengawasan Konstruksi .
- c) Hibah masuk dari Pihak ke-3 berupa hibah kios di Area Terminal Jatibarang

atas nama Didik Setiyono senilai Rp 337.500.000 NPHD no.B/028/2149/2023

- d) Mutasi Masuk senilai Rp 312.233.000 berupa 2 unit mobil dari Setda dan Papan Informasi dari Dinperwaskim.

- 2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	1.742.000
2	Reklas Ke B. Persediaan	677.341.800
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	847.282.000
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	
24	Koreksi Kurang (.....)	2.848.000
	Jumlah Pengurangan	1.529.213.800

Penjelasan :

- Belanja Modal yang dikeluarkan dari Aset Tetap karena tidak memenuhi kapitalisasi senilai Rp 1.742.000 .
- Reklasifikasi ke Persediaan senilai Rp 677.341.800 berupa material perbaikan Penerangan Jalan Umum .
- Penghapusan Aset tetap Berupa kendaraan dan bangunan terminal senilai Rp 847.282.000 .
- Koreksi kurang berupa pengembalian Belanja Modal Pembangunan Terminal Banjarharjo senilai Rp 2.848.000 .

- 3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp 109.257.000 dan Rp 109.257.000 Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhuta
------------------	--------------	---------------	---------------	----------------	------------------	-----------------

			(Rp)	(%)		ng (Rp)
DE Pembangunan terminal tipe C ketanggungan	CV.JAYA KONSULTAN	027.2/1766/S PK/2020/DK/2.09.01.01/2020	54,431,000	100%	54,431,000	
Dokumen lingkungan pembangunan terminal tipe c ketanggungan	CV.REDCON MITRA PRATAMA	027.2/2294/S PK/2020/DK/2.09.01.01/2020	54,826,000	100%	54,826,000	
Jumlah					109.257.000	

a
san :

- a) Kedua Pekerjaan tersebut bersumber dana dari APBD TA 2020 nilai KDP tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp 109.257.000

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2023	Ket
DE Pembangunan terminal tipe C ketanggungan	54.431.000			54.431.000	
Dokumen lingkungan pembangunan terminal tipe c ketanggungan	54.826.000			54.826.000	
JUMLAH	109.257.000			109.257.000	

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2023 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(15.125.070.302)	(1.507.119.754)	(411.412.081)	(16.220.777.975)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(17.100.453.681)	(2.416.944.401)	(126.220.111)	(19.391.177.971)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	(109.456.340)	(50.000)		(109.506.340)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	(32.334.980.323)	(3.924.114.155)	(537.632.192)	(35.721.462.286)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.223.643.029		283.476.629	96	1.507.119.754
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.416.944.372			29	2.416.944.401
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	50.000				50.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya					-
Jumlah	3.640.637.401	-	283.476.629	125	3.924.114.155

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2023 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	411.412.000		81	411.412.081
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	126.220.091		20	126.220.111
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan				-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya				-
Jumlah	537.632.091	-	101	537.632.192

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2023 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 19.316.000 dan Rp 28.974.000 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud	135.658.210	135.658.210
Aset Lain-lain		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(116.342.210)	(106.684.210)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		
Jumlah	19.316.000	28.974.000

1. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp

- 19.316.000 . Saldo tersebut berupa software/aplikasi.
2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud
Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp.(116.342.210) Mutasi terdiri atas :
- Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp (106.684.210)
 - Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud sebesar Rp 9.658.000
- 1) .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, dengan saldo masing-masing sebesar Rp 255.873.493 dan Rp 167.535.456 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
Utang Bunga		
Utang Pinjaman Jangka Pendek		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
Pendapatan Diterima Dimuka		
Utang Belanja	255.873.493	167.535.456
Utang Jangka Pendek Lainnya		
Jumlah	255.873.493	167.535.456

1. Utang Belanja

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2023 sebesar Rp255.873.493 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Pegawai	239.716.378	152.125.040
Utang Belanja Barang dan Jasa – Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa – Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa – Jasa	16.157.115	15.410.416
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		

Uraian	Saldo Th. 2023	Saldo Th. 2022
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	255.873.493	167.535.456

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2023 sebesar Rp 181.155.295
 - 2) Utang Tunjangan Fungsional PNS sebesar Rp 47.500.000
 - 3) Utang Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp 6.756.479
 - 4) Utang Tunjangan PPhTunjangan Khusus PNS sebesar 2.678.204
 - 5) Utang Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 1.626.400
- b. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas belanja Listrik sebesar Rp 11.512.280
 - 2) Utang atas belanja Telepon sebesar Rp 2.112.055
 - 3) Utang atas belanja Air sebesar Rp 151.500
 - 4) Utang atas belanja Jasa Honor Kontrak sebesar Rp 2.200.000
 - 5) Utang jaminan kesehatan non PNS sebesar Rp 88.000
 - 6) Utang jaminan Kecelakaan kerja non PNS sebesar Rp5.280
 - 7) Utang jaminan kematian non PNS sebesar Rp 88.000
- c. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

2. Pengurangan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2022 sebesar Rp 152.125.040
 - 2) Utang Belanja Listrik sebesar Rp11.170.006
 - 3) Utang belanja Telepon sebesar Rp2.110.910
 - 4) Utang belanja Air sebesar Rp179.500
 - 5) Utang honor tenaga kontrak sebesar Rp 1.950.000

2. Utang Jangka Pendek Lainnya

nihil

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima

SP2D dari BUD atau menyetor kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada NeracaDinas Perhubungan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp 117.466.220.976 dan Rp 115.913.549.205. Perubahan atas ekuitas tahun 2023 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS :	NILAI (Rp)
EKUITAS AWAL	115,913,549,205
Surplus/(Defisit)-LO	(17,348,460,300)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Ekuitas	28.756.347
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	188.72.375.724
EKUITAS AKHIR	117.466.220.976

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp (18.872.375.724) Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp (17.348.460.300) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp (1.523.915.424) . Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(18.872.375.724)
Penambahan	7.231.721.810
Pengurangan	5.707.806.386
Surplus/(Defisit) LO	(17.348.460.300)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.7.1**

3.5.1. Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1. Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.299.536.000	2.299.536.000	-
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	337.500.000		337.500.000
Jumlah	2.637.036.000	2.299.536.000	337.500.000

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.299.536.000	2.299.536.000	-

a. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah	2.299.536.000	2.299.536.000	-

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO	337.500.000		337.500.000

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th.	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga	337.500.000
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	337.500.000

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

nihil

3.5.1.2. Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.5.1.2.1. Beban Operasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	5.779.887.465	5.692.296.127	(87.591.338)
Beban Barang dan Jasa	10.243.921.525	9.562.874.022	(681.047.503)
Beban Bunga			-
Beban Subsidi			-
Beban Hibah			-
Beban Bantuan Sosial			-
Beban Penyisihan Piutang			-
Beban Lain-lain			-
Jumlah	16.023.808.990	15.255.170.149	(768.638.841)

2. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.401.759.939	3.343.198.856	(58.561.083)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	58.561.083
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	

Uraian	(Rp)
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	58.561.083

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	2.322.669.526	2.293.639.271	(29.030.255)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	181.155.295
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	152.125.040
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	29.030.255

c. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	11.700.000	11.700.000	-

3. Beban Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	2.031.678.876	1.232.093.072	(799.585.804)

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Saldo Awal	275.271.692
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	677.341.800
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	
Penambahan Hutang Persediaan	

Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	153.027.688
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Selisih	799.585.804

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	6.710.466.387	6.829.004.688	118.538.301

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	16.157.115
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	15.410.416
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	119.285.000
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	(118.538.301)

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	788.135.557	788.135.557	-

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	713.640.705	713.640.705	-

3.5.1.2.2. Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.223.643.029		(1.223.643.029)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.309.727.032		(2.309.727.032)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	107.267.340		(107.267.340)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			-
Beban Penyusutan Aset Lainnya			-
Jumlah	3.640.637.401	-	(3.640.637.401)

Selisih tersebut karena Beban Penyusutan Aset Tetap tidak diperhitungkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.658.000		(9.658.000)

Selisih tersebut karena Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tidak diperhitungkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

3.5.1.2.3. Defisit Non Operasional

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	311,391,909.00		(311,391,909.00)
Jumlah	311,391,909.00	-	(311,391,909.00)

Selisih tersebut karena Defisit Non Operasional tidak diperhitungkan dalam Laporan Realisasi Anggaran

BAB IV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas Perhubungan, membawahi :

1. Kepala ;
2. Sekretaris :
 - a. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Lalu Lintas
4. Bidang Sarana dan Keselamatan
5. Bidang Prasarana dan Keselamatan
6. Kelompok Jabatan Fungsional;

4.3 PERSONALIA

Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes memiliki 247 personil, terdiri dari satu orang Kepala Dinas ,3 orang Kepala Bidang, 2 orang Kasubag, 16 Jabatan Fungsional dan 226 orang staf di mana 50 orang adalah PNS dan 197 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2023. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

KEPADA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BREBES



Drs. BUDI DARMAWAN, M.Si
NIP. 19680210 198803 1 004